	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO JL.Frans Nala Tlp /Fax (0385) 2443235 Kode Pos 86554 E-mail : palabajo@gmail.com LABUAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT NUSA TENGGARA TIMUR	Nomor SOP	SOP/AP/61
		Tanggal Pembuatan	**02 Mei 2018**
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Aktif	**02 Mei 2018**
		Disahkan oleh	Ketua, **H. Ridwan Fauzi, S.Ag.** **NIP.197312311998031008**

SOP PELAYANAN PERMOHONAN PERCERAIAN PNS DAN TNI POLRI

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 4. Buku II Mahkamah Agung RI 5. Lampiran KMA No. 026 Tahun 2012 Angka IV huruf H, angka 1 dan 2 6. KMA/032/SK/IV/2006 Tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan 7. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasoinal Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. 8. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1. S.1 sederajat 2. SMA sederajat 3. Memahami Pola Bindalmin 4. Memahami dan menguasai hukum acara/hukum formil dan hukum materiil. 5. Memahami perkembangan hukum acara/hukum formil dan hukum materiil. 6. Dapat mengoperasikan Aplikasi SIPP
KETERKAITAN	**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN**
1. SOP Penerimaan Permohonan/Gugatan 2. SOP Register Perkara Permohonan/Gugatan. 3. SOP pembuktian	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, Register Perkara permohonan/gugatan, dan terupload pada aplikasi SIPP
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Jika tidak memahami permohonan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI POLRI maka proses perkara akan terhambat karena menunggu surat yang berhubungan dengan izin dari atasan dan atau yang berwenang. 2. Wajib menunjukan surat Izin Atasan, Jika tidak ada Izin Atasan sebaiknya memberi pemahaman untuk mengurusnya terlebih dahulu.	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik.

SOP PELAYANAN PERMOHONAN PERCERAIAN PNS DAN TNI POLRI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku			
		Majelis Hakim	Panitera Pengganti	Para Pihak	Kpanmud Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Surat izin diperbolehkan Cerai dari Atasan Pemohon/ Penggugat atau Termohon/ Tergugat.					Petugas Register	5 menit	Surat Izin Atasan untuk melakukan Perceraian	
2	Surat Atasan Pemohon/ Penggugat atau Termohon / Tergugat tidak boleh cerai.					Petugas Register	10 menit	Surat Atasan tidak memberi izin	
3	Laporan perkara perceraian PNS dan TNI POLRI					Laporan Perkara	15 menit	Laporan PP 10 Tahun 1983	

SOP PELAYANAN PERMOHONAN PERCERAIAN PNS DAN TNI POLRI									
No.	**Kegiatan**	**Pelaksana**				**Mutu Buku**			
		Majelis Hakim	Panitera Pengganti	Para Pihak	Kpanmud Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Petugas Kasir membukukan uang panjar biaya Permohonan yang tercantum dalam SKUM pada Buku Jurnal Keuangan Perkara.					Petugas Register, SKUM dan Buku Jurnal	15 menit	Perkara di daftar dan Tercatat dalam Jurnal	

DOKUMEN MASTER	:	√					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	___	___	___
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO